



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN SAMPANG
TAHUN 2020**

**PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG
2021**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	1
KATA PENGANTAR	2
BAB I PENDAHULUAN	
1. Latar Belakang.....	4
2. Maksud dan Tujuan.....	5
3. Tupoksi dan Struktur Organisasi.....	5
4. Aspek Strategis dan Permasalahan Utama.. ..	8
5. Sumber Daya Organisasi	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. PERENCANAAN STRATEGIS	11
1. Tujuan	11
2. Sasaran	12
3. Strategi dan Arah Kebijakan	13
4. Program	14
5. Kegiatan	14
B. PERJANJIAN KINERJA	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2016	19
B. REALISASI ANGGARAN	23
1. Alokasi Per Sasaran Pembangunan.....	23
2. Pencapaian Kinerja dan Anggaran Pembangunan	24
3. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	25
4. Realisasi Anggaran	25
BAB IV PENUTUP	28

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum. Wr. Wb.

Kami Panjatkan puji syukur yang sedalam-dalamnya kehadirat Allah SWT, karena atas berkah rahmat dan hidayah-Nya semata, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2019 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sampang dapat diselesaikan tepat waktu.

Penyusunan Laporan Kinerja dimaksud untuk memberikan gambaran yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan tentang kinerja suatu instansi pemerintah. Hasilnya diharapkan dapat membantu pimpinan dan seluruh jajaran instansi pemerintah dalam mencermati berbagai permasalahan sebagai bahan acuan dalam menyusun program di tahun berikutnya. Dengan demikian program di tahun mendatang dapat disusun lebih fokus, efektif, efisien, terukur, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Laporan ini disusun dalam rangka untuk memenuhi kelengkapan laporan sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Review atas Laporan Kinerja.

Semoga dengan disusunnya Laporan Kinerja ini bermanfaat untuk menunjang kelancaran dalam pelaksanaan tugas.

Wassalammu'alaikum. Wr. Wb.

Sampang, Januari 2021
Plt. KEPALA BAKESBANG DAN POLITIK
KABUPATEN SAMPANG

ANANG DJOENAEDI SANTOSO, S.Sos, M.Si
Pembina TK.I
NIP. 19660125.199403.1.008

A. Latar Belakang

Salah satu cara yang tepat untuk meningkatkan efektifitas pengelolaan manajemen pemerintahan adalah dengan cara melakukan reformasi pengelolaan dan pertanggungjawaban instansi pemerintah. Instansi pemerintah menetapkan sasaran strategis dengan ukuran – ukuran kinerja yang jelas dan terukur. Sistem AKIP tidak saja menekankan pada output (keluaran) sebuah kegiatan, tetapi lebih menekankan pada outcomes (hasil), dengan demikian maka dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) menekankan pada hasil kegiatan dan untuk itu perlu mendapat perhatian. LKjIP sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban kegiatan tahunan yang telah disusun dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) sangat tepat dipakai sebagai salah satu tolok ukur untuk mengukur keberhasilan maupun kegagalan dalam melaksanakan kegiatan pembangunan. Untuk mengukur keberhasilan maupun kegagalan dalam melaksanakan prioritas pembangunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sampang telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan instansi pemerintah.

Rangkaian program/kegiatan Tahun 2020 adalah bagian integral dalam mendukung pencapaian tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2019-2024 Pemerintah Kabupaten Sampang, dan diakumulasikan dalam beberapa program utama dalam Pembangunan Tahun 2020 yaitu seperti kegiatan Penyuluhan Pencegahan Peredaran / Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba,

Peningkatan kapasitas jaringan informasi konflik, Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur bangsa, Pemantapan wawasan kebangsaan bagi pejabat aparatur pemerintah dan masyarakat, Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM), Forum KerukunanUmat Beragama, Sosialisasi dan Diskusi Politik, Pemberdayaan dan peningkatan kinerja parpol, Keormasan dan LSM, Optimalisasi Pemantauan dan Perkembangan Politik Pilkada, Peningkatan Pelaksanaan RAN HAM, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.

Dari uraian pengertian diatas , Laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sampang dalam melaksanakan kegiatan yang bersumber dana APBD Tingkat II, dituangkan dalam Laporan Kinerja. Keberhasilan pembangunan kesatuan bangsa dan politik yang telah diraih selama ini dan masa yang akan datang tidak lepas dari peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sampang dalam menjalankan fungsi manajemen organisasi.

Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2020 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Review atas Laporan Kinerja. Hal ini merupakan bagian dari Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah Pemerintahan yang baik bersih dan berwibawa (Good Governance and Clean Government) di Indonesia sebagaimana telah diamanatkan oleh rakyat melalui Tap MPR Nomor IX Tahun 1998.

B. Maksud Dan Tujuan.

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sampang ini adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sampang. Sedangkan Tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja adalah untuk menilaidan mengevaluasi pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sampang. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan kemudian dirumuskan beberapa rekomendasi. Diharapkan rekomendasi yang dihasilkan dari Laporan Kinerja ini dapat meningkatkan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sampang.

C. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sampang

Untuk menjalankan tugas pokok tersebut Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sampang mengacu pada fungsi-fungsi Bakesbang dan Politik antara lain:

- Penyusunan kebijakan teknis dan strategi Pembangunan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam jangka pendek dan menengah.
- Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan pengembangan sistem politik.
- Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan Pemilu.
- Pelaksanaan fasilitasi kegiatan integrasi bangsa
- Pelaksanaan kewaspadaan dibidang kesatuan bangsa dan politik
- Pelaksanaan fasilitasi bidang budaya politik
- Pengkoordinasian kegiatan kesatuan bangsa dan politik dengan instansi dan atau lembaga terkait.

- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan kesatuan bangsa dan politik.
- Pelaksanaan tugas-tugas Ketatausahaan.
- Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sampang berdasarkan Peraturan Bupati Sampang No. 58 Tahun 2008

Susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sampang terdiri dari :

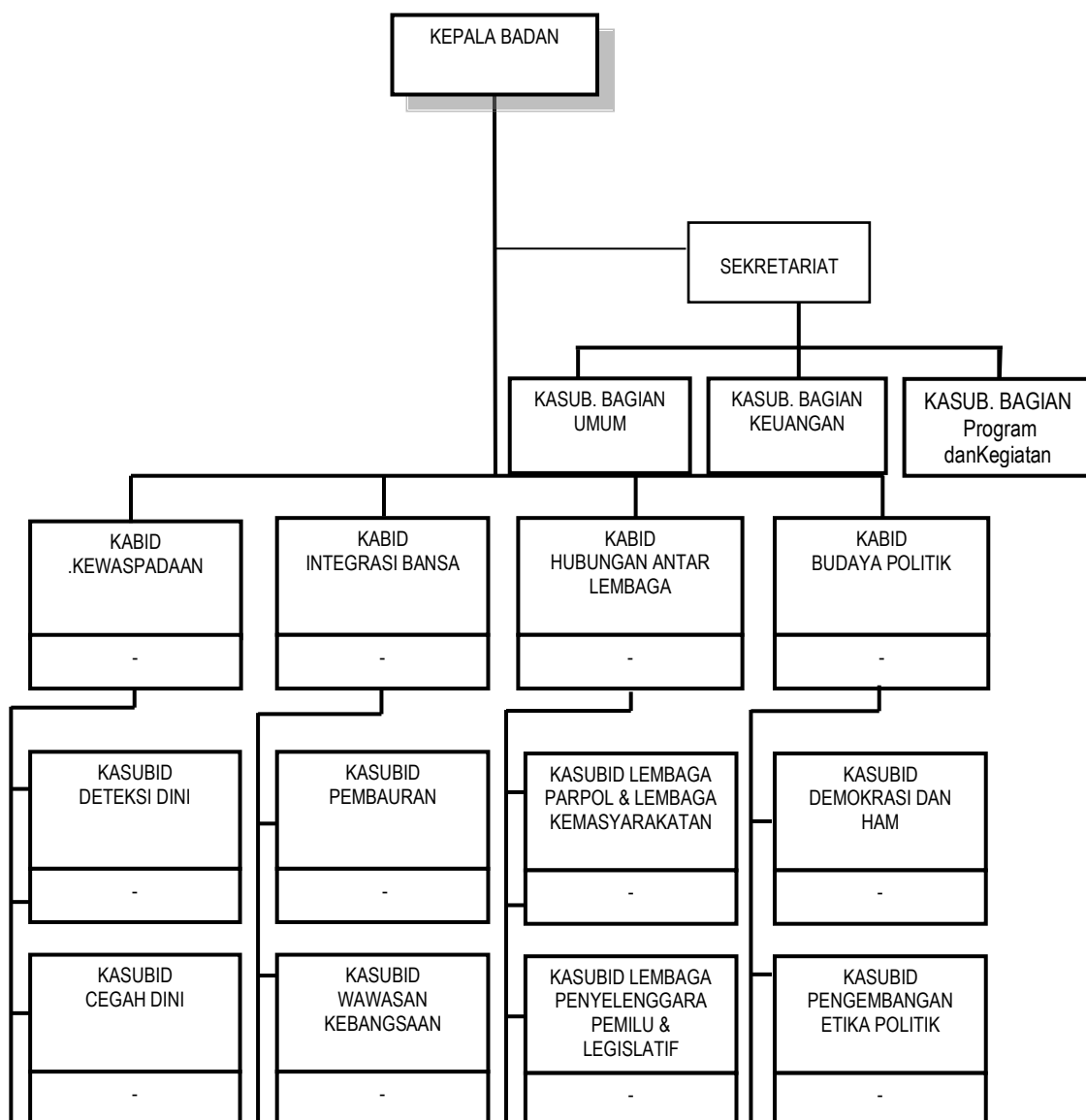
1. Kepala Badan bertanggung jawab sepenuhnya kepada Bupati Sampang, dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh satu orang Sekretaris dan empat Kepala Bidang.
2. Sekretariat membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Program dan Kegiatan
3. Kepala Bidang Hubungan Antar Lembaga membawahi:
 - a. Sub Bidang Lembaga Partai Politik dan Lembaga Kemasyarakatan
 - b. Sub Bidang Lembaga Penyelenggaraan Pemilu dan Legislatif
4. Kepala Bidang Integrasi Bangsa membawahi :
 - a. Sub Bidang Wawasan Kebangsaan
 - b. Sub Bidang Pembauran
5. Kepala Bidang Budaya Politik membawahi :
 - a. Sub Bidang Demokrasi dan Hak Asasi Manusia
 - b. Sub Bidang Pengembangan Etika Politik
6. Kepala Bidang Kewaspadaan membawahi :
 - a. Sub. Bidang Deteksi Dini

b. Sub Bidang Cegah Dini

Sekretariat dan masing-masing bidang dipimpin oleh seorang Sekretaris dan Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Badan.

Susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sampang terdiri dari :

Bagan Struktur Organisasi Bakesbang dan Politik Kab. Sampang



D. Aspek Strategis dan Permasalahan Utama (strategic issued)

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sampang sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Sampang No. 58 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupten Sampang mempunyai tugas pokok :

“ Membantu Bupati dalam Melaksanakan Urusan Rumah Tangga Daerah dan Tugas Pembantuan, serta Melakukan Pembinaan, Koordinasi, Pengawasan, dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri “

Sedangkan Permasalahan Utama (strategi issue) yang dihadapi Bakesbang dan Politik Kabupaten Sampang adalah :

- Belum optimalnya peran kewaspadaan dini masyarakat sampai dengan jenjang paling bawah, Maraknya kasus narkoba terutama yang melibatkan generasi muda
- Belum semua organisasi kemasyarakatan ikut berperan aktif dalam peningkatan pembangunan di Kabupaten Sampang.
- Kurangnya kesadaran masyarakat untuk berdemokrasi dalam iklim politik yang dinamis
- Belum optimalnya kesadaran dan pemahaman masyarakat akan nilai-nilai luhur dan jati diri bangsa

E. Sumber Daya Organisasi

Dalam penyelenggaraan kegiatan organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sampang di dukung oleh sumber daya manusia yang memadai.

Sebagai gambaran berikut ini diinformasikan Jumlah Pegawai Negeri Sipil Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sampang yang dirinci menurut pangkat/golongan sebagai berikut:

a. Jumlah Pegawai Negeri Sipil : 20 orang dengan rincian sbb :

PNS yang menduduki Jabatan Struktural 15 orang, sedangkan yang tidak menduduki jabatan 5orang.

No	Jabatan	PERSONEL PNS					Pangkat/ Golongan	Jumlah
		Eselon	Eselon	Eselon	Non	Jbt		
		II	III	IV	Eselon	Funsgl		
1	KepalaBadan							
2	Sekretaris		1				Pembina TK.I (IV/b)	1
3	Kabid		4				Pembina (IV/a)	4
4	Kasubid			2			Pembina (IV/a)	2
5	Kasubid			6			Penata TK I (III/d)	6
6	Kasubag			2			Penata TK.I (III/d)	2
7	Kasubag			1			Penata (III/c)	1
8	Staf				2		PenataMuda (III/a)	2
9	Staf				1		Pengatur TK I	1
9	Staf				1		Pengatur	1
10	Staf				1		Juru TK I (I/d)	1
JumlahKeseluruhan								20

b. Pegawai Honor Tidak Tetap berjumlah 16orang dengan rincian sbb :

No	JENIS HONOR	PENDIDIKAN TERAKHIR			JUMLAH
		S.1	D.3	SMA	
1	Tidak Tetap	4	2	8	16 orang
Jumlah keseluruhan					16 orang

F. CASCADING BAKESBANG DAN POLITIK

Berdasarkan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah selanjutnya dijabarkan kedalam Cascading yang merupakan dokumen ernyataan proses penjabaran, penyelarasan dan penurunan kinerja secara bertahap secara vertikal dari level yang lebih tinggi ke level yang lebih rendah untuk mewujudkan target yang ingin

dicapai dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra dan dijadikan acuan dalam penyusunan perjanjian kinerja.

POHON KINERJA / CASCADING BAKESBANG DAN POLITIK KABUPATEN SAMPANG

TUJUAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR	FORMULA	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR	FORMULA	NANA PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	NAMA KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR
Meningkatnya penyelesaian konflik sosial politik	Persentase penyelesaian konflik sosial politik	$\frac{\text{konflik yang diselesaikan}}{\text{jumlah konflik}}$	Meningkatnya pencegahan dan penanganan potensi konflik sosial	Persentase penurunan potensi konflik	$\frac{(n-1) - n}{n-1} \times 100\%$	Program Peningkatan Kewaspadaan Dini	Fasilitasi dan Koordinasi Penanganan Konflik	Persentase penurunan kejadian terkait konflik sosial	Cegah Dini Permasalahan Sosial	Meningkatkan kapasitas jaringan Informasi konflik	Jumlah Peserta Sosialisasi P4GN dan Jumlah Rapat Koordinasi TIM BNK, Jumlah Rakor Anggota Tim Kominda
									Deteksi Dini Permasalahan Sosial	Menampung informasi dalam menjaga stabilitas keamanan di Daerah	Jumlah Rakor TIM Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)
						Program Pemantapan dan Penguatan Kelembagaan Demokrasi	Fasilitasi dan peningkatan kesadaran masyarakat untuk berdemokrasi dalam proses politik.	Persentase lembaga demokrasi yang dilegalisasi	Pemberdayaan dan peningkatan kinerja parpol, keorganisasian dan LSM	Peningkatan Peran Ormas/Lsm Dalam Pembangunan Kabupaten Sampang	Jumlah Peserta Sosialisasi dan Pembinaan serta pemberdayaan
									Optimalisasi pemantauan dan perkembangan Politik Pileg dan Pilpres	Penguatan peran Partai Politik dalam Pileg dan Pilpres serta Fasilitasi Dan Verifikasi Bantuan Dana Pada Partai Politik	Jumlah Laporan Perkembangan Politik di Kabupaten Sampang, Bantuan Keuangan Partai Politik, Jumlah Diskusi Politik
						Program Pengembangan Etika dan Budaya politik	Upaya peningkatan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam berbudaya politik	Persentase masyarakat yang mendapatkan pemahaman etika dan budaya politik	Peningkatan dan pengembangan Etika Politik	Penguatan Etika Politik Generasi Muda, Masyarakat	Jumlah masy. yang mengikuti kegiatan Pemantapan Etika Politik
									Koordinasi Penegakan HAM	Penguatan Karakter Pemenuhan Kesadaran HAM	Jumlah Rakor Tim & Laporan RAN HAM
						Program Integrasi Kebangsaan	Upaya peningkatan kesadaran masyarakat akan wawasan kebangsaan	Jumlah Kelompok yang mendapatkan peningkatan wawasan kebangsaan	Pengembangan Wawasan kebangsaan	Penguatan dan Pengembangan Wawasan Kebangsaan serta Revitalisasi dan Aktualisasi Ideologi Nilai-Nilai Pancasila	Jumlah Pelaksanaan Upacara Bela Negara, Jumlah Peserta yang Mengikuti Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan
									Pemantapan pembauran kebangsaan	Penguatan Lembaga FKUB dan FPK	Jumlah Rakor Tim PAKEM, Jumlah Rakor Tim FKUB, Jumlah Fasilitasi Pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)

TUJUAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR	FORMULA	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR	FORMULA	NANA PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	NAMA KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR
						Program Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran	Meningkatnya Administrasi dan Jasa Perkantoran	Jumlah Surat Terkirim, Jumlah Pembayaran Rekening Langgan, Telepon, Air dan Listrik, Perpanjangan Ijin STNK dan Alat dan Bahan Kebersihan
									Penyediaan Sarana Administrasi Perkantoran	Tersedia Sarana Administrasi Perkantoran	Jumlah ATK, Jumlah Barang Cetak dan Pengandaan, Jumlah Komponen Instalasi listrik / penerangan bangunan kantor, jumlah surat kabar, jumlah makanan dan minuman untuk Rapat Staf dan Tamu
									Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar Daerah	Terwujudnya Koordinasi dan Konsultasi dalam dan Luar Daerah	Jumlah Rakor luar daerah, jumlah Rakor dalam daerah
						Program Perangkat Sarana dan Prasarana Aparatur	Terwujudnya Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam keadaan baik	Pengadaan / Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terwujudnya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Perlengkapan gedung kantor, jumlah meubelair yang tersedia, jumlah komputer yang tersedia, jumlah peralatan dan perlengkapan, gedung kantor aparatur pemerintah daerah yang terpelihara secara rutin, pemeliharaan rutin / berkalkendaraan dinas / operasional, jumlah meubelair yang terpilih secara rutin / berkala, Pemeliharaan rutin / berkala peralatan
						Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terwujudnya peningkatan aparatur pemerintah dalam kapasitas aparatur pemerintah	Prosentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Pelaksanaan Bimtek / Sosialisasi / Seminar	Meningkatkan keterampilan teknis dilingkungan Bakesbangpol	Jumlah Pegawai yang mengikuti Bimtek
						Program Peningkatan Sistem Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Pelayanan Informasi Publik	Terwujudnya Sistem Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Pelayanan Informasi Publik	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran, pelaporan kinerja dan pelayanan publik	Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan	Laporan capaian dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD, Laporan keuangan semesteran, laporan keuangan akhir tahun	3 Laporan
									Penyusunan Dokumen perencanaan dan penganggaran	Renja, RKA-SKPD dan DPA-SKPD	3 Laporan
									Peningkatan Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Promosi Pelayanan Perangkat Daerah	2 Paket

G. PETA PROSES BISNIS BAKESBANG DAN POLITIK

Dokumen Cascading selanjutnya dibandingkan dengan peta proses bisnis yang merupakan diagram yang menggambarkan ubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi/level untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan. Penyusunan peta proses bisnis menjadi salah satu factor suksesnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di instansi pemerintah. Penyusunan peta proses bisnis merupakan bagian dari penataan tata laksana

yang dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas system proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan teruku pada masing–masing instansi pemerintah. Jika poses bisnis yang berbelit-belit dan tumpang-tindih antara satu unit organisasi dengan unit organisasi yang lain akan membuat organisasi menjadi lambat untuk bekerja. Oleh karena itu, setiap unit organisasi memerlukan peta proses bisnis yang mampu menggambarkan proses bisnis yang dilakukan oleh organisasi dalam mencapai visi, misi, dan tujuan organisasi. Peta proses bisnis sendiri merupakan asset terpenting organisasi yang mengumpulkan seluruh informasi kedalam satu kesatuan dokumen atau database organisasi. Dengan demikian, menjadi sebuah keniscayaan untuk melibatkan seluruh elemen organisasi dalam penyusunan peta proses bisnis untuk memastikan akurasi dan kelengkapan dari proses bisnis yang digambarkan sesuai dengan rencana strategis organisasi. Tujuan penyusunan peta proses bisnis adalah untuk menjadi dasar pengambilan keputusan strategis terkait pengembangan organisasi dan sumberdaya manusia, serta penilaian kinerja. Peta proses bisnis bermanfaat untuk melihat potensi masalah yang ada di dalam pelaksanaan suatu proses sehingga solusi penyempurnaan proses lebih terarah, serta memiliki standar pelaksanaan pekerjaan sehingga memudahkan dalam mengendalikan dan mempertahankan kualitas pelaksanaan pekerjaan. Berikut Peta Proses Bisnis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sampang :



TUJUAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DIBENTUK

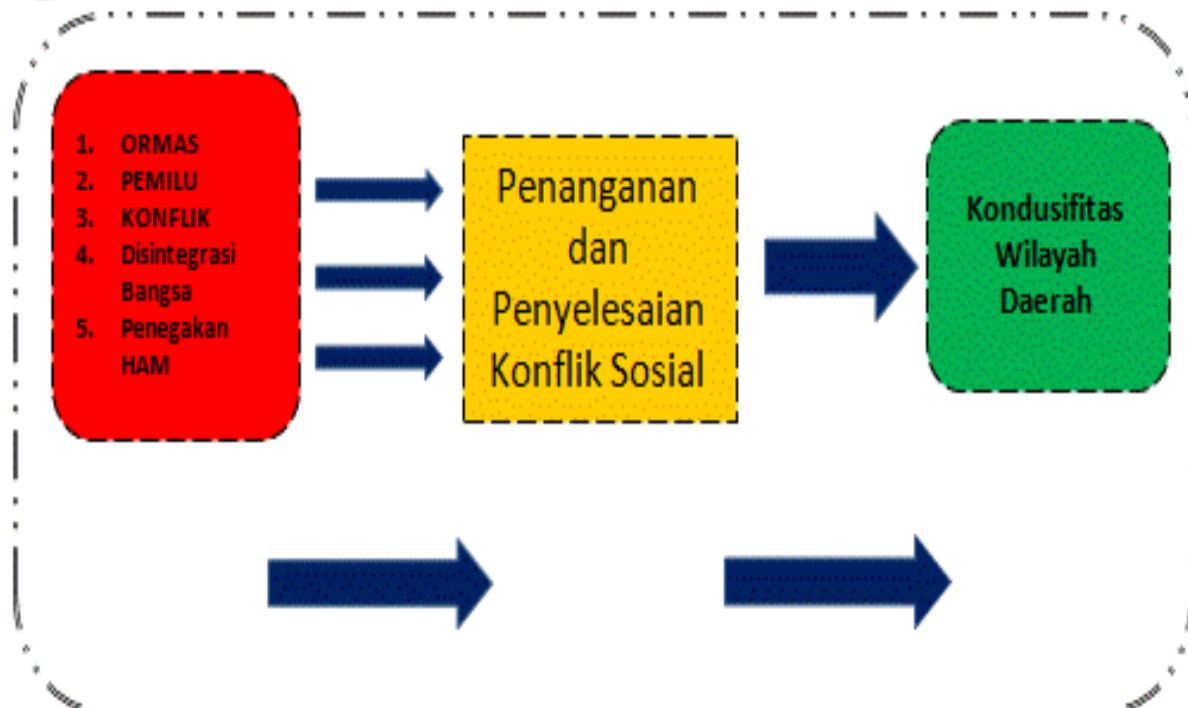
1.

Peraturan Bupati Sampang Nomor 58 Tahun 2008 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Bakesbang dan Politik Kabupaten Sampang

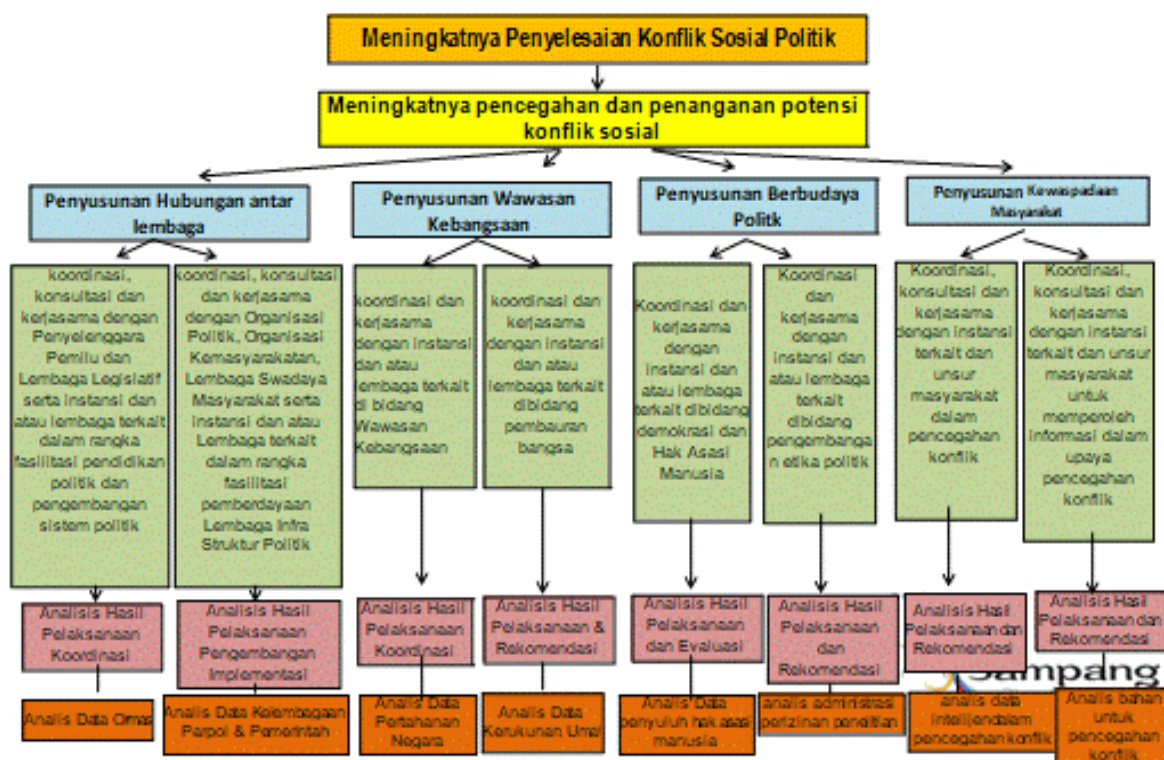
Bakesbang dan Politik mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan rumah tangga daerah dan tugas pembantuan serta melakukan pembinaan, koordinasi, pengawasan dan penyelenggaraan dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri



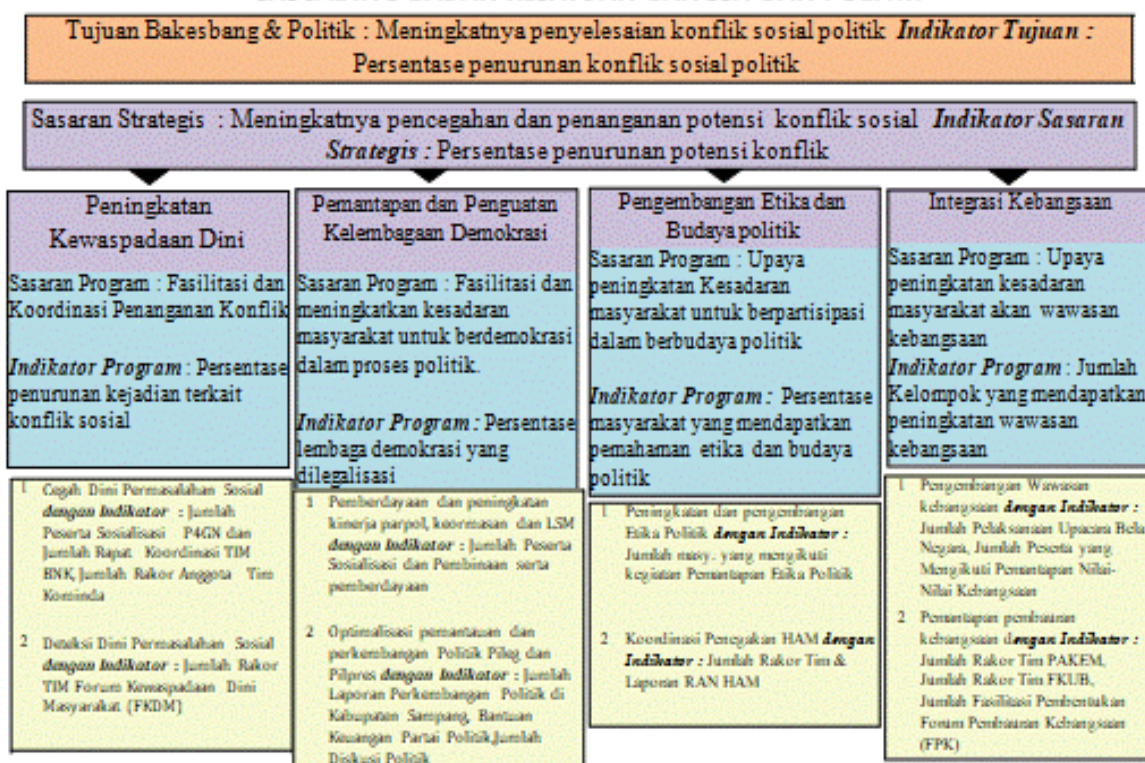
SECARA UMUM PROSES BISNIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK



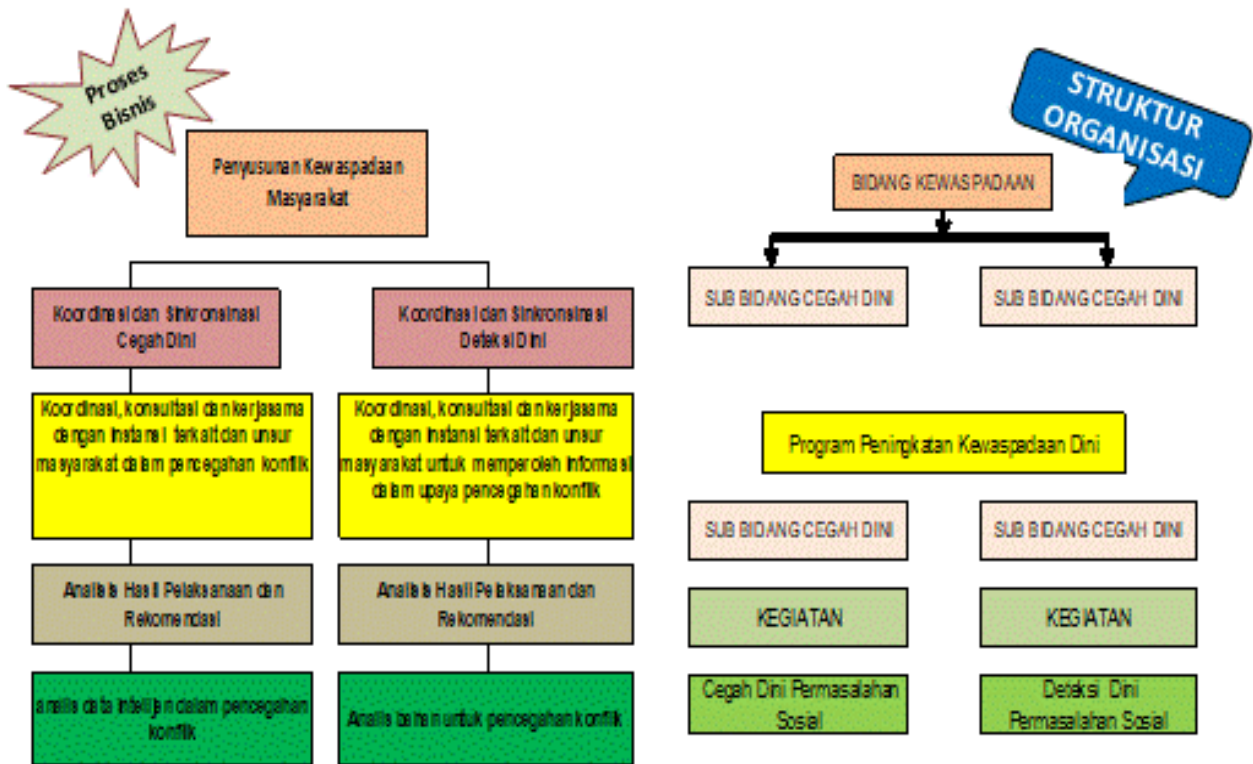
INTI PROSES BISNIS BAKESBANG DAN POLITIK



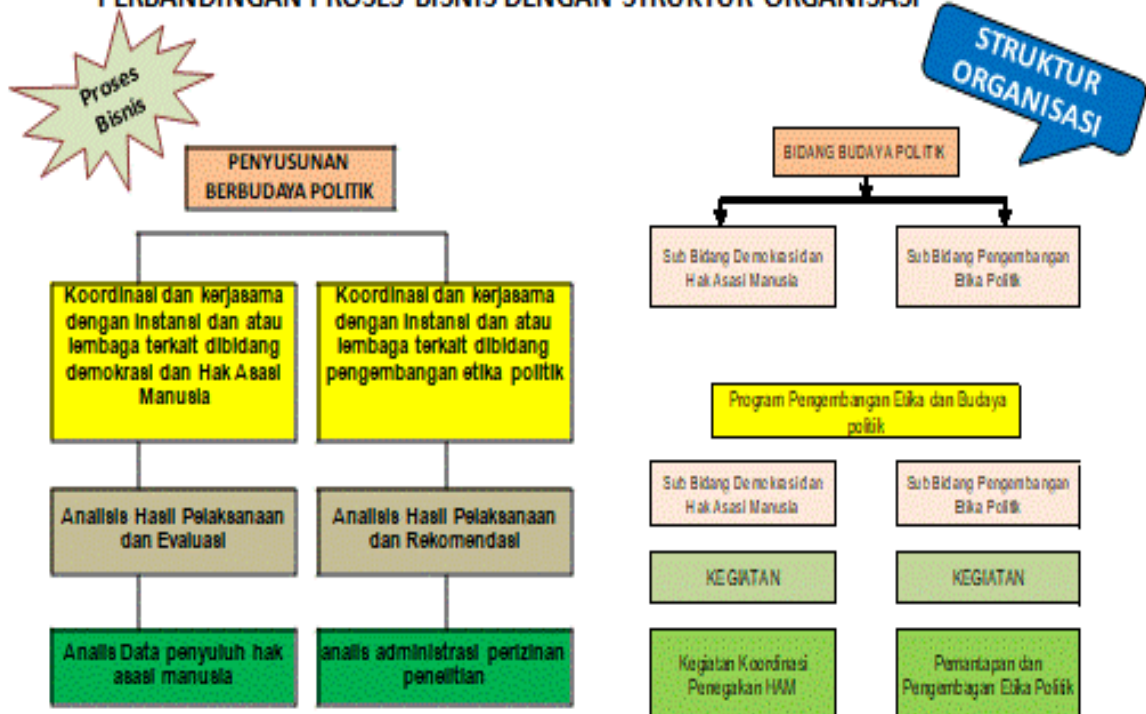
CASCADING BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK



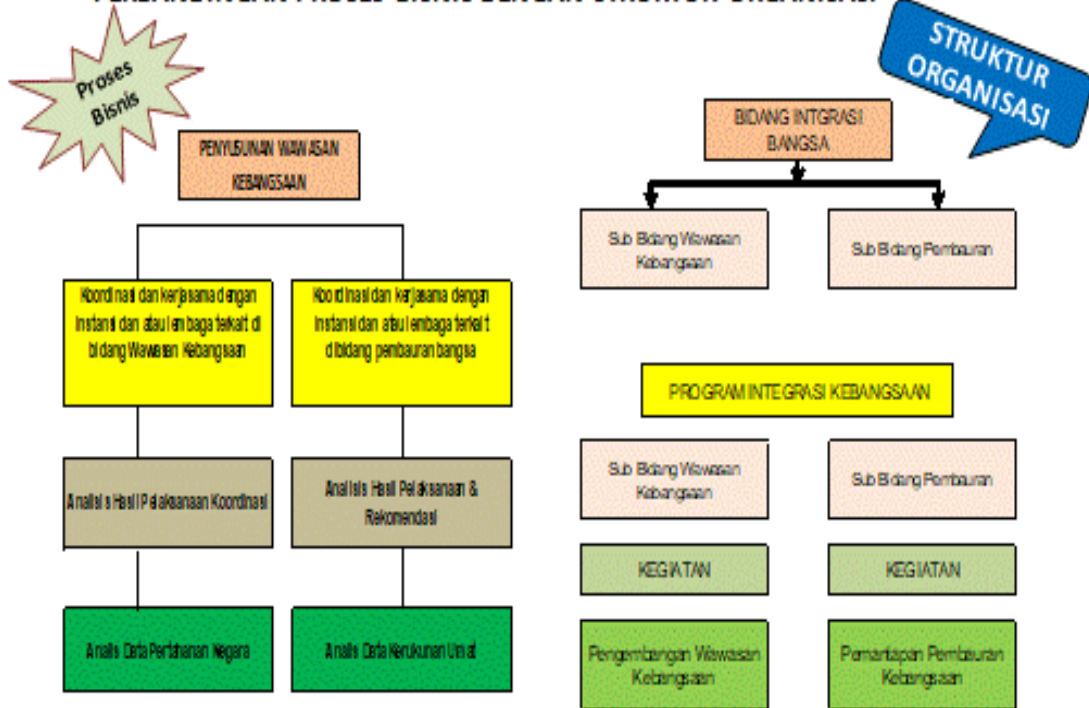
PERBANDINGAN PROSES BISNIS DENGAN STRUKTUR ORGANISASI



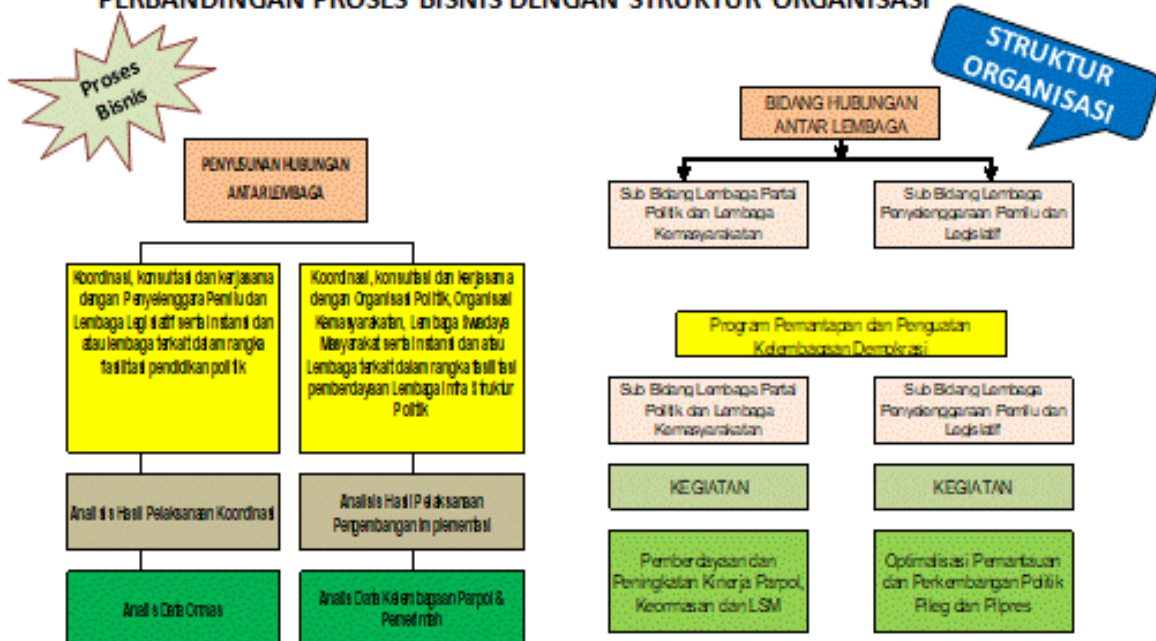
PERBANDINGAN PROSES BISNIS DENGAN STRUKTUR ORGANISASI



PERBANDINGAN PROSES BISNIS DENGAN STRUKTUR ORGANISASI



PERBANDINGAN PROSES BISNIS DENGAN STRUKTUR ORGANISASI



A. Perencanaan Strategis

Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sampang disusun untuk mampu menjawab tuntutan perkembangan pembangunan melalui pentahapan yang konsisten, jelas dan berkesinambungan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil. Sehingga Rencana Strategis ini dapat dijadikan acuan dalam melaksanakan pembangunan jangka waktu 2019-2024, dimana didalamnya terdapat tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang akan dilaksanakan selama 5 tahun yang dijabarkan pelaksanaannya dalam program kegiatan, sebagaimana diuraikan lebih lanjut :

1. TUJUAN

Dalam menetapkan tujuan dan sasarannya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sampang mengacu pada rumusan faktor-faktor kunci keberhasilan yang telah ditetapkan. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sampang sebagai salah satu Organisasi Pemerintah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten yang mempunyai tujuanyaitu : “Meningkatkannya Penyelesaian Konflik Sosial Politik”.

Table. 2.1 : Matrik Tujuan

No	Tujuan	Indikator Kinerja
1	Meningkatkannya Penyelesaian konflik sosial Politik	Persentase penyelesaian konflik sosial politik

2. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Oleh karenanya sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program dan kegiatan. Adapun Sasaran yang ingin dicapai oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sampang adalah ***Meningkatnya pencegahan dan penanganan potensi konflik sosial.***

Pelaksanaan pembangunan harus dapat diukur realisasinya. Karena itu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sampang telah menetapkan Indikator Kinerja pada setiap sasaran strategis sebagai alat ukur atas berhasilnya atau kegagalan pembangunan dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik di Kabupaten Sampang selama 5 (lima) tahun kedepan (2019 –2024). Adapun hasil pengukuran keberhasilan dan kegagalan dalam capaian setiap sasaran pembangunan dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik di Kabupaten Sampang Tahun 2020 dengan alat ukur Indikator Kinerja adalah Persentase penurunan potensi konflik

Tabel 2.3
Matrik Hubungan antara Tujuan dan Sasaran

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja
1	Meningkatnya penyelesaian konflik sosial politik	Meningkatnya pencegahan dan penanganan potensi konflik sosial	Persentase penurunan potensi konflik

3. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran, sedangkan kebijakan adalah pedoman pelaksanaan tindakan-tindakan tertentu. Dengan demikian kebijakan merupakan kumpulan keputusan yang menentukan secara teliti

tentang bagaimana strategi akan dilaksanakan yang berfungsi mengatur suatu mekanisme tindakan untuk pelaksanaan pencapaian tujuan dan sasaran.

Kebijaksanaan yang ditentukan Badan Kesatuan Bangsa dan Kabupaten Sampang dalam mewujudkan tujuan dan sasaran dengan Strategi Meningkatkan kerja sama lintas sektoral dalam mewujudkan stabilitas politik di Kabupaten Sampang, Memfasilitasi komunikasi antar umat beragama dan aliran kepercayaan, Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap bahaya Narkoba, Memfasilitasi hubungan kelembagaan partai politik, Memfasilitasi organisasi sosial kemasyarakatan dalam mewujudkan stabilitas kehidupan sosial kemasyarakatan, Meningkatkan sosialisasi wawasan kebangsaan Sedangkan Arah Kebijakan Mengoptimalkan Peran Lembaga - Lembaga yang melekat di Bakesbang dan Politik Kabupaten Sampang (Lembaga Kewaspadaan Dini,FKDM, Tim BNK Kabupaten Sampang, FKUB, FPK, serta TIM HAM Kabupaten Sampang.

4. Program

Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu dan dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah maupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat atau yang merupakan partisipasi aktif masyarakat guna mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan. Program yang telah ditetapkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sampang berdasarkan Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) Tahun 2020 sebanyak 8 (delapan) program yang dijabarkan dalam 18 (Delapan belas) kegiatan.

5. Kegiatan

Kegiatan merupakan segala sesuatu yang harus dilakukan instansi dalam merealisasikan program. Kegiatan mencerminkan strategi konkrit / nyata organisasi untuk dapat diimplementasikan dengan sebaik-baiknya dengan kebijakankebijakan organisasi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis tersebut.

Terdapat 16 (enam belas) kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sampang pada Tahun 2020 sebagai berikut yaitu :

- A. Program Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran
 - 1. Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran
 - 2. Penyediaan Sarana Administrasi Perkantoran
 - 3. Rapat – rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah
- B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - 1. Pembangunan/Rehab/Pemeliharaan Gedung Kantor
 - 2. Pengadaan / Pemeliharaan Kendaraan Dinas / Operasional
 - 3. Pengadaan / Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- C. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - 1. Pelaksanaan Bintek / Sosialisasi / Seminar
- D. Program Peningkatan Sistem Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Pelayanan Informasi Publik
 - 1. Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan
 - 2. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran
 - 3. Peningkatan Pelayanan Informasi Publik
- E. Program Peningkatan Wawasan Kebangsaan
 - 1. Cegah Dini Permasalahan Sosial
 - 2. Deteksi Dini Permasalahan Sosial
- F. Program Pemantapan dan Penguatan Kelembagaan Demokrasi
 - 1. Pemberdayaan dan Peningkatan Kinerja Parpol, Keormasan dan LSM
 - 2. Optimalisasi Pemantauan dan Perkembangan Politik Pileg & Pilpres

G. Program Pengembangan Etika dan Budaya Politik

1. Pemantapan dan Pengembangan Etika Politik
2. Koordinasi Penegakan HAM

H. Program Integrasi Kebangsaan

1. Pengembangan Wawasan Kebangsaan
2. Pemantapan Pembauran Kebangsaan

B. PERJANJIAN KINERJA

Rencana Strategis (Renstra) Kabupaten Sampang merupakan Perjanjian jangka menengah dan bersifat global yang perlu dijabarkan dalam Perencanaan yang lebih mikro dan operasional oleh masing-masing SKPD dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 yang tiap tahunnya akan dijabarkan dalam dokumen RKT. Penyusunan RKT berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PERMENPAN & RB) Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja.

Adapun Perjanjian Kinerja Tahun 2020 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sampang adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3.
Perjanjian Kinerja Tahun 2020

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Program	Anggaran
1	Meningkatnya penyelesaian konflik sosial politik	Meningkatnya pencegahan dan penanganan potensi konflik sosial	Persentase penurunan potensi konflik	Program Peningkatan Kewaspadaan Dini	778.841.000
				Program Pemantapan dan Penguatan Kelembagaan Demokrasi	157.159.000

				Program Pengembangan Etika dan Budaya Politik	179.653.000
				Program Integrasi Kebangsaan	243.737.000
				Program Pelayanan Administrasi & Jasa Perkantoran	278.121.140
				Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	118.366.250
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	7.100.000
				Program peningkatan Sistem Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan & Pelayanan Informasi Publik	23.842.000

Perjanjian Kinerja Tahunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sampang Tahun 2020 yang telah dibuat untuk melaksanakan kegiatan, program dan sasaran di tahun 2020 menjadi tumpuan bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sampang untuk mewujudkan kinerja Output ataupun Outcome yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sampang Tahun 2020.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodic. Penyusunan LKjIP ini didasarkan pada pengukuran hasil pelaksanaan perencanaan Strategis dan Rencana Kerja Tahunan yang telah ditetapkan sebelumnya serta setelah berakhirnya pelaksanaan kegiatan dalam tahun 2020

Akuntabilitas Kinerja dalam format Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sampang tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi perencanaan yang sudah berjalan mulai dari Perencanaan Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ataupun Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dan Penetapan Kinerja (PK) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sampang pun tidak terlepas dari pelaksanaan pembangunan itu sendiri sebagai fungsi Actuating. dari berbagai piranti perencanaan yang sudah dibuat tersebut, hingga kemudiannya sampai pada saat pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan yang mengoptimalkan seluruh sumber daya manajemen pendukungnya.

Pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan pembangunan sifatnya terukur, terdapat standar pengukuran antara yang diukur dengan indikator pengukurannya. Pertanggungjawaban pengukuran yang diukur adalah kegiatan, program, dan sasaran, yang prosesnya adalah sejauh mana kegiatan, program, dan

sasaran dilaksanakantidak salah arah dengan perangkat perencanaan yang telah dibuat.Adapun pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan targetsetiap Indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitunganakan diketahui selisih atau celah kinerja (peformance gap). Selanjutnya berdasarkanselisih Kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepatuntuk peningkatan Kinerja dimasa yang akan datang (performance improvement).

Pengukuran kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sampang tahun 2019 menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan MenteriPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 53 Tahun 2014tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan TataCara Review atas Laporan Kinerja.

A. Capaian Kinerja

Berikut ini merupakan gambaran umum pencapaian kinerja hasilpengukuran kinerja beserta evaluasi setiap tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sampang tahun 2020 disajikan sebagai berikut :

TUJUAN : MeningkatkanPenyelesaiankonfliksosialpolitik

Sasaran I : Meningkatnya pencegahan dan penanganan potensi konflik sosial

Untuk mengetahui keberhasilan capaian sasaran ini menggunakan parameter yang dapat diukur melalui indikator yaitu Persentase potensi konflik sosial yang dicegah, sebagaimana disajikan dalam Tabel 3.2, sebagai berikut :

Tabel 3.2.
Pencapaian Kinerja Sasaran I

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya pencegahan dan penanganan potensi konflik sosial	Persentase penurunan potensi konflik	100 %	30 %	85,71 %

Pada tahun 2020 untuk di wilayah Kab. Sampang tidak ada konflik sosial yang baru, namun yang ada proses penyelesaian konflik sosial tahun 2012. Pemerintah Kabupaten Sampang terus melaksanakan upaya – upaya penyelesaian konflik sosial di Kabupaten Sampang baik masyarakat yang tinggal di Desa Karang Gayam Kec. Omben dan Desa Blu’uran Kec. Karang Penang serta di Rusunawa Puspa Agro Jemundo Sidoarjo.

Tabel 3.3
Perbandingan realisasi persentase penurunan potensi konflik Tahun 2019-2020

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	
				2019	2020
1	Meningkatnya pencegahan dan penanganan potensi konflik sosial	Persentase penurunan potensi konflik	100 %	90 %	85,71%

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sampang memetakan data rawan dipetakan menurut bidang ipoleksosbudhankam sebagaimana data pada tabel dibawah ini

Data Rawan Potensi Konflik di Kabupaten Sampang Tahun 2019 – 2020

NO	BIDANG	POTENSI KONFLIK	
		2019	2020
1	Bidang Idiologi	2 Kasus	2 Kasus
2	Politik	1 Kasus	2 Kasus
3	Ekonomi	4 Kasus	0 Kasus
4	Sosial Budaya	2 Kasus	2 Kasus
5	Hankam	1 Kasus	1 Kasus
Jumlah		10 Kasus	7 Kasus

Dari data rawan potensi konflik tersebut diatas kita dapat melihat realisasi sasaran Bakesbang dan Politik Kabupaten Sampang pada tahun 2020 yang indikator sasarannya prosentase penurunan potensi konflik dengan formula :

$$\frac{(n-1) - n}{n-1} \times 100 \% \Rightarrow : \frac{10 \text{ kasus} - 7 \text{ kasus}}{10 \text{ kasus}} \times 100 \% \\ \Rightarrow : = 30 \%$$

Keterangan : (n-1) : Tahun 2019
n : Tahun 2020

Dari 7 kasus tersebut hanya dibidang sosial budaya ada 1 kasus yaitu konflik sosial yang belum tuntas penyelesaiannya, sebenarnya bukan kasus konflik sosial baru yaitu konflik sosial tahun 2012 dimana para pengungsi saat ini berada di Rusunawa Puspa Agro Jemundo Sidoarjo. Kendala yang dihadapi saat ini yaitu bagaimana mewujudkan keinginan para pengungsi ini untuk kembali ke tempat tinggalnya sendiri di Desa Karang Gayam Kecamatan Omben dan Desa Blu'uran Kecamatan Karang penang. Uapaya Pemerintah Kabupaten Sampang dalam proses penyelesaian konflik di Tahun 2020 yaitu dilaksanakannya pertemuan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten Sampang dengan para tokoh dan perwakilan baik masyarakat yang tinggal di Desa Karang Gayam Kec. Omben dan Desa Blu'uran Kec. Karang Penang serta para pengungsi di Rusunawa Puspa Agro Jemundo Sidoarjo. Dalam pertemuan tersebut disimpulkan bahwa beberapa upaya yang nantinya akan menjadi motode penyelesaian dan sebagian telah berjalan yaitu dengan pendekatan peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang menjadi korban konflik baik yang tinggal di Desa Karang Gayam Kec. Omben dan Desa Blu'uran Kec. Karang Penang serta di Rusunawa Puspa Agro Jemundo Sidoarjo. Pada tahun ini langkah - langkah yang diambil yaitu pendekatan pendekatan inten kepada kedua belah pihak baik kepada para pengungsi di Rusunawa Puspa Agro Jemundo Sidoarjo dan kepada masyarakat yang tinggal di Desa Karang Gayam Kec. Omben dan Desa Blu'uran Kec. Karang Penang, supaya para pengikut pengungsi bisa kembali ke rumah tinggal asalnya. Langkah yang telah dilakukan adalah Pelaksanaan Baiat kepada para pengungsi yang berada di Rusunawa Puspa Agro Jemundo Sidoarjo. Pelaksanaan Baiat bagi para pengungsi dengan harapan para

pengungsi kembali keajarannya semula, sesuai apa yang dikehendaki oleh para masyarakat yang tinggal di Desa Karang Gayam Kec. Omben dan Desa Blu'uran Kec. Karang Penang yang telah dilaksanakan pada tanggal 5 Nopember 2020 bertempat di Pendopo Bupati Sampang, Pemerintah Kabupaten Sampang juga melakukan Program Pemondokan anak – anak pengikut Tajul Muluk ke Pondok Pesantren Lirboyo Kediri dan Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang. Pemerintah Kabupaten Sampang juga terus melakukan upaya penggalangan terhadap para tokoh – tokoh yang berpengaruh di kedua belah pihak, guna menjaga kamtibmas yang aman dan konflik sosial ini segera selesai. Adapun Program yang mendukung Indikator Sasaran Prosentase penurunan potensi konflik ada 1 (satu) Program yaitu Program Peningkatan Kewaspadaan Dini Berupa Rakor Tim Kominda sebanyak 12 kali, Rakor Tim BNK sebanyak 12 kali dan Rakor Tim FKDM sebanyak 12 Kali.

B. REALISASI ANGGARAN

1. Alokasi Per Sasaran Pembangunan Tahun 2020

No	Sasaran Strategis / Progam		Indikator Kinerja	Anggaran	% Anggaran
1	Meningkatnya pencegahan dan penanganan potensi konflik sosial	Program Peningkatan Kewaspadaan Dini	Persentase penurunan potensi konflik	778.867.400	43,54%

Catatan : Persentase anggaran pada masing-masing sasaran strategis dibandingkan dengan keseluruhan (total) anggaran (Belanja Langsung ex Rutin + Pembangunan) pada Bakesbangpol Kab. Sampang Belanja Langsung : Rp. 1.788.546.290,-

2. Pencapaian Kinerja Dan Anggaran Tahun 2020

Sasaran Strategis / Progam	Indikator	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
Sasaran : Meningkatnya pencegahan dan penanganan potensi konflik sosial Program : Peningkatan Kewaspadaan Dini	Persentase penurunan potensi konflik	100 %	30 %	85,71 %	778.867.400	557.273.743	71,55%

3. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Berdasarkan persentase capaian kinerja dan penyerapan anggaran padamasing-masing indikator sasaran, dapat diukur tingkat efisiensi penggunaan sumber daya, sebagaimana disajikan dalam Tabel 3.4, sebagai berikut :

Tabel 3.4
Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran	Indikator Sasaran	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya pencegahan potensi konflik sosial	Persentase potensi konflik sosial yang dicegah	85,71 %	71,55%	14,16%

Upaya yang dilakukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sampang dalam meningkatkan sinergitas dengan Instansi terkait tetap memerlukan dukungan anggaran, dengan harapan mampu meminimalisir kejadian yang timbul, baik kejadian terkait politik, kejadian terkait HAM, kejadian terkait Ipoleksosbud dan Tibmas, maupun kejadian terkait keagamaan di wilayah Kabupaten Sampang, yang pada akhirnya dapat mengantarkan pada kehidupan masyarakat Kabupaten Sampang yang kondusif.

4. REALISASI ANGGARAN

Akuntabilitas keuangan dilaksanakan mulai dari perumusan rencana keuangan, pelaksanaan pembiayaan kegiatan dan pelaksanaan pelaporan. Penyusunan anggaran keuangan dibuat berdasarkan pola Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sampang dimana pada Tahun Anggaran Tahun 2020 mendapatkan Alokasi dana untuk program pembangunan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD setelah perubahan) sebesar Rp. 1.788.546.290,- Program Badan Kesatuan Bangsa Kabupaten Sampang dibiayai dari anggaran APBD Tahun 2020. Komposisi anggaran

dalam kaitannya dengan upayamewujudkan prioritas pembangunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sampang . Sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sampang membelanjakan anggaran daerah sebagai berikut :

Tabel 3.5
Pagu Anggaran dan Realisasi Tahun Anggaran 2020

NO	URAIAN	ANGGARAN		
		ANGGARAN	REALISASI	%
A	BELANJA TIDAK LANGSUNG (BTL)	2.492.490.451,80	1.758.941.547	70,57
B	BELANJA LANGSUNG (BL)	1.788.546.290	1.232.641.525	68,92
1	Program Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran	279.821.140	222.186.863	79,40
	1 Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran	148.460.000	102.636.439	69,13
	2 Penyediaan Sarana Administrasi Perkantoran	104.874.140	101.512.324	96,79
	3 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	26.487.000	18.038.100	68,10
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	118.366.250	83.601.659	70,63
	1 Pembangunan / Rehab / Pemeliharaan Gedung Kantor	13.196.250	13.196.000	100,00
	2 Pengadaan/Pemeliharaan Kendaraan Dinas Opearsional	46.930.000	27.200.564	57,96
	3 Pengadaan/Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	58.240.000	43.205.095	74,18
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	7.100.000	-	-
	1 Pelaksanaan BinteK / Sosialisasi / Seminar	7.100.000		-
4	Program Peningkatan Sistem Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Pelayanan Infomasi Publik	23.842.500	15.769.800	66,14
	1 Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan	8.185.000	7.690.100	93,95
	2 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	8.157.500	8.079.700	99,05
	3 Peningkatan Pelayanan Informasi Publik	7.500.000	-	-

5	Program Peningkatan Kewaspadaan Dini	778.867.400	557.273.743	71,55
	1 Cegah Dini Permasalahan Sosial	357.831.000	167.822.403	46,90
	2 Deteksi Dini Permasalahan Sosial	421.036.400	389.451.340	92,50
6	Program Pemantapan dan Penguatan Kelembagaan Demokrasi	157.159.000	77.790.029	49,50
	1 Pemberdayaan dan peningkatan kinerja parpol, keormasan dan LSM	95.085.000	56.012.233	58,91
	2 Optimalisasi Pemantauan dan Perkembangan Politik Pileg & Pilpres	62.074.000	21.777.796	35,08
7	Program Pengembangan Etika dan Budaya Politik	179.653.000	144.481.705	80,42
	1 Pemantapan dan Pengembangan Etika Politik	169.004.000	141.063.225	83,47
	2 Koordinasi Penegakan HAM	10.649.000	3.418.480	32,10
8	Program Integrasi Kebangsaan	243.737.000	131.537.726	53,97
	1 Pengembangan Wawasan Kebangsaan	138.575.000	36.913.276	26,64
	2 Pemantapan Pembauran Kebangsaan	105.162.000	94.624.450	89,98
	JUMLAH (BL + BTL)	4.281.036.742	2.991.583.072	69,88

Laporan Kinerja tahun 2020 merupakan kelanjutan laporan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sampang Tahun 2020 yang dibuat untuk menggambarkan capaian kinerja dan prestasi maupun permasalahan yang dihadapi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sampang. Laporan kinerja ini dapat dijadikan tolak ukur keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran dalam Rencana Strategis (Renstra) untuk mengetahui sejauhmana manfaat pelayanan di bidang Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik bagi masyarakat.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun untuk menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi selama Tahun Anggaran 2020 yang merupakan cerminan dari hasil kinerja Bakesbang dan Politik Kabupaten Sampang selama satu tahun dan diukur melalui pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam lampiran penetapan kinerja tahun 2020

Dalam mewujudkan sasaran-sasaran. Bakesbang dan Politik Kabupaten Sampang telah berusaha untuk mendapatkan keberhasilan capaian yang maksimal melalui kegiatan-kegiatan tahun 2020,dapat diketahui pencapaian target indikator kinerja sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam Renstra Bakesbang dan Politik Kabupaten Sampang tahun 2019-2024.

Namun tidak dipungkiri adabeberapa kegiatan yang anggarannya tidak terserap seluruhnya atau tidak tercapai 100 % hal tersebut tentu tidak terlepas dari kendala-kendala teknis yang dihadapi. Sebagai upaya dalam rangka meminimalkan kendala yang ada, Bakesbang dan Politik Kabupaten Sampang terus berupaya mengoptimalkan Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana yang ada serta

mengoptimalkan koordinasi dengan instansi/pihak terkait dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Semoga Laporan Kinerja ini dapat memberikan informasi dan menjadi acuan peningkatan kinerja aparatur Bakesbang dan Politik Kabupaten Sampang pada tahun-tahun berikutnya.

Dalam rangka meningkatkan kinerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sampang ke depan, maka ada beberapa langkah yang akan dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sampang secara umum, antara lain :

- a. Meningkatkan kualitas perencanaan agar dokumen perencanaan yang disusun dapat digunakan dan dapat mengurangi kesalahan / keraguan dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
- b. Menggunakan upaya pemecahan masalah dalam dokumen ini sebagai strategi peningkatan capaian kinerja pada pelaksanaan program / kegiatan tahun selanjutnya.
- c. Memanfaatkan hasil evaluasi kinerja sebagai bahan perbaikan pelaksanaan program/kegiatan.
- d. Memberdayakan sumber daya yang ada pada Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kabupaten Sampang secara menyeluruh, efektif, dan efisien.
- e. Menguatkan komitmen dari semua bidang untuk meningkatkan kinerjanya